

Dinamika politik, ekonomi, dan administrasi Dinasti Umayyah

Political, Economic, and Administrative Dynamics of the Umayyad Caliphate

Linda Wati*, Amril M

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

* lindawati.lw05071981@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

Umayyah dynasty,
political reform,
Islamic administration,
economic policy,
historical decline

Article History

Received 2025-05-05
Accepted: 2025-06-13

This literature-based study revisits the political consolidation, fiscal innovation, and administrative reforms achieved by the Umayyad Caliphate (661–750 CE). Using a qualitative historiographical approach, it synthesises primary chronicles and recent academic works to expose three key developments: (1) transformation from elective caliphate to hereditary monarchy; (2) economic unification through Arabisation of currency and bureaucracy; and (3) layered administrative offices that standardised taxation, justice, and communication across a trans-regional empire. These findings show how early government system, monetary policy, and institutional design under Muawiyah, Abdul Malik, and Umar II propelled unprecedented expansion yet simultaneously seeded structural weaknesses that precipitated decline. The article clarifies the caliphate's dual legacy: state-building prototypes for later Muslim polities and cautionary lessons on centralised power; and suggests comparative avenues for future Islamic governance research.

Copyright © 2025, Linda Wati & Amril M

Published by MAN 4 Kota Pekanbaru

DOI: [10.56113/takuana.v4i1.129](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i1.129)

1. PENDAHULUAN

Dinasti Umayyah (661–750 M) menandai titik balik dalam sejarah pemerintahan Islam, ketika kekhalifahan tidak lagi dipilih melalui proses *syūrā* (musyawarah) sebagaimana pada masa Khulafaur Rasyidin, melainkan diwariskan secara turun-temurun dalam format monarki hereditas.¹ Model kekuasaan ini tidak hanya membawa perubahan dalam sistem legitimasi politik tetapi juga berdampak terhadap cara negara mengelola wilayah, sumber daya, dan ketahanan administratifnya.² Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke

¹ Hussein Haleeb Al-Shaibani, "Umayyad Attempts in Distorting the Image of Imam Hussein (Peace Be upon Him) Critical Review," *Journal Of Babylon Center for Humanities Studies* 12, no. 1 (2022): 503–526.

² Maysaroh Maysaroh, "Analisis Dampak Arabisasi Pada Masa Dinasti Umayyah Di Timur: Perspektif Sosial Dan Politik (661-750 M)," *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, no. 2 (December 31, 2023): 57–61.

Damaskus, Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pendiri dinasti ini membangun fondasi pemerintahan sentral yang didukung oleh jaringan birokrasi dan militer yang luas. Pada saat yang sama, pengembangan institusi seperti *diwān al-kharāj* (departemen keuangan), *diwān al-jund* (militer), dan *diwān al-barid* (sistem pos) menunjukkan kemunculan struktur negara yang terorganisasi secara sistematis.³ Dalam konteks inilah, Dinasti Umayyah tidak dapat hanya dipahami sebagai perluasan geografis kekuasaan Islam, melainkan juga sebagai eksperimen awal pembangunan negara dalam tradisi pemerintahan Islam.

Meskipun penting dalam sejarah kenegaraan Islam, Dinasti Umayyah cenderung lebih banyak dikaji secara tematik dan terpisah dalam berbagai studi akademik. Agus Mahfudin Setiawan dan Ahmad Sodikin (2023), misalnya, menyoroti aspek dakwah dan legitimasi kekuasaan,⁴ sementara Nurrohmah Saputri (2017) memfokuskan pada manifestasi simbolik kekuasaan melalui arsitektur masjid-masjid besar pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan.⁵ Kajian-kajian lain yang mengangkat topik serupa umumnya menganalisa dimensi politik, ekonomi, dan administrasi sebagai ranah yang otonom, tanpa menghubungkannya secara sistemik. Akibatnya, pembacaan atas keberhasilan dan kegagalan Dinasti Umayyah kerap bersifat parsial dan tidak mampu menggambarkan kompleksitas institusional yang sebenarnya. Padahal, dalam praktik pemerintahan Umayyah, dimensi-dimensi tersebut saling terkait dan berkelindan secara erat dalam membentuk struktur dan orientasi kekuasaan.

Gap literatur tersebut menegaskan pentingnya suatu pendekatan integratif yang mampu menyoroti keterhubungan antara transformasi politik, kebijakan fiskal, dan restrukturisasi administrasi dalam satu kerangka naratif historis. Kebijakan pencetakan dinar Arab sebagai simbol kemandirian fiskal, penataan ulang sistem pajak dan pos, serta pengembangan departemen administratif lintas fungsi bukan hanya mencerminkan kemajuan birokrasi Dinasti Umayyah tetapi juga menjadi indikator terbentuknya arsitektur negara Islam awal.⁶ Meski demikian, karakteristik pemerintahan yang terpusat, kuatnya loyalitas kesukuan, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas memicu ketegangan struktural berupa sentralisasi kekuasaan yang berlebihan dan konflik antara para elite. Situasi ini pada akhirnya menjadi faktor-faktor yang mempercepat kemunduran dan kejatuhan Dinasti Umayyah pada pertengahan abad ke-8 M.

Berdasarkan latar historis dan celah analitis tersebut, artikel ini menawarkan suatu pembacaan sintetik terhadap Dinasti Umayyah sebagai model awal formasi negara dalam Islam. Tulisan ini berpijak pada asumsi bahwa keberhasilan ekspansi politik tidak dapat dilepaskan dari reformasi fiskal dan konsolidasi administratif yang menyertainya. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan tidak hanya merekonstruksi peristiwa secara kronologis, melainkan mengevaluasi bagaimana desain institusional (baik dalam bidang

³ Melia Frastuti, "Reformasi Sistem Administrasi Pemerintahan, Penakhlukkan Di Darat Dan Di Lautan Pada Era Bani Umayyah," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 2 (December 18, 2020): 119–127.

⁴ Agus Mahfudin Setiawan and Ahmad Sodikin, "Transisi khalifah Umayyah: dari Muawiyah bin Abu Sufyan ke Yazid bin Muawiyah (661-683 M)," *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 1, no. 1 (2023): 17–31.

⁵ Itsnawati Nurrohmah Saputri, "Perkembangan Kubah Batu, Masjid Damaskus, Perluasan Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi pada Masa Khalifah Abdul Malik Bin Marwan dan Walid Bin Abdul Malik," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 2, no. 2 (December 15, 2017): 195–220.

⁶ Meirison Meirison and Desmadi Saharuddin, "The Distinction of Government Administration and Judicial Institutions in The Umayyad Dynasty," *Buletin Al-Turas* 27, no. 1 (January 30, 2021): 123–138.

keuangan, birokrasi, maupun sistem komunikasi) berperan dalam menentukan stabilitas kekuasaan. Artikel ini juga memosisikan bahwa kerentanan sistemik dalam tubuh Dinasti Umayyah, terutama akibat absennya mekanisme pengawasan kekuasaan dan ketegangan sosial-politik yang tak terkelola, merupakan variabel kunci dalam proses disintegrasinya.

Dengan kerangka analitis tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji transformasi politik secara menyeluruh dari sistem musyawarah menuju monarki dalam pemerintahan Islam awal; mengevaluasi kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan Dinasti Umayyah sebagai fondasi ekspansi dan stabilitas; serta memetakan reformasi administratif yang dilakukan untuk menunjang efektivitas birokrasi. Di samping itu, tulisan ini juga menelaah faktor-faktor struktural yang berkontribusi terhadap kemunduran dan kejatuhan Dinasti Umayyah. Melalui pendekatan historiografis-kritis, kajian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap wacana keilmuan mengenai kajian sejarah pemerintahan Islam dalam perspektif pendidikan, humaniora, dan ilmu sosial.

2. METODE

Kajian ini ditulis menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dengan orientasi historis-analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada dinamika institusional dan kebijakan pemerintahan Dinasti Umayyah yang terekam dalam sumber-sumber sejarah primer maupun sekunder. Tujuan utama dari metode ini bukan hanya merekonstruksi peristiwa secara kronologis, melainkan juga memahami struktur dan logika kekuasaan di balik transformasi politik, reformasi fiskal, dan reorganisasi administrasi pada masa kekhalifahan Umayyah.⁷ Adapun sumber data primer dalam penelitian adalah karya-karya sejarah klasik seperti *Tārikh al-Rusul wa al-Mulūk* karya al-Tabari⁸ dan *al-Kāmil fi al-Tārikh* karya Ibn al-Athir yang memuat narasi otoritatif tentang perkembangan politik, kebijakan fiskal, dan struktur pemerintahan. Selain itu, digunakan pula bukti historis berupa mata uang kekhalifahan dan catatan-catatan kebijakan fiskal yang terdokumentasi yang menunjukkan penerapan kebijakan moneter seperti pencetakan dinar Arab serta institusi *diwān* sebagai instrumen negara. Selanjutnya, sumber sekunder yang digunakan terdiri atas buku-buku akademik dan artikel jurnal ilmiah yang relevan, baik dalam lingkup sejarah peradaban Islam maupun dalam studi tata kelola kekuasaan. Referensi sekunder dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan kebaruan dan relevansi analitis serta dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis tematik yang dikembangkan secara deduktif-induktif. Prosedur ini dilakukan dengan mengategorikan informasi berdasarkan tiga domain utama, yaitu politik, ekonomi, dan administrasi, lalu menghubungkannya secara intertekstual untuk membentuk sintesis naratif yang utuh. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan laporan sejarawan klasik dengan kajian akademik modern, serta melalui pengecekan silang antar periode dalam rentang waktu kekuasaan Umayyah (661–750 M). Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil analisis tidak hanya mampu menjelaskan kronologi peristiwa, tetapi juga mengungkap struktur kekuatan institusional yang membentuk sekaligus melemahkan kekhalifahan tersebut.

⁷ Haradhan Kumar Mohajan, "Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects," *Journal of Economic Development, Environment and People* 7, no. 1 (2018): 23–48.

⁸ Muḥammad Jarir al-Ṭabari, *Tārikh Al-Rusul Wa-l-Mulūk*, vol. 5, 9 vols. (Mesir: Darul Ma'arif, 1967).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Transformasi Politik dan Konsolidasi Kekuasaan

Setelah wafatnya Ali ibn Abi Talib (40 H/661 M),⁹ Musyawarah Siffin yang berlarut-larut berujung pada penyerahan kekuasaan oleh al-Hasan ibn Ali kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan melalui perjanjian perdamaian tahun 41 H.¹⁰ Kesepakatan ini menegaskan *bai'ah* tunggal di Kufah, Basrah, dan Damaskus, sekaligus mengakhiri perpecahan politik pasca Perang Jamal. Rangkaian konsolidasi politik Dinasti Umayyah (661–680 M) mulai dari pemindahan pusat administrasi ke Damaskus hingga penataan ulang struktur militer Syam mencerminkan upaya sentralisasi kekuasaan dan pembentukan sistem pemerintahan yang lebih stabil dan terstruktur (Tabel 1). Sementara itu, genealogi kekuasaan dari Muawiyah hingga Abdul Malik menunjukkan integrasi dua cabang utama Umayyah yang memperkuat kontrol dinasti pasca-Karbala (Gambar 1). Di titik inilah Muawiyah memperkenalkan praktik suksesi turun-temurun dengan menobatkan Yazid sebagai putra mahkota yang menandai transisi sistem politik dari khilafah kolektif-konsultatif menuju format monarki patrimonial dalam sejarah Islam awal.

Tabel 1. Kronologi konsolidasi politik Dinasti Umayyah (661 – 680 M)

Tahun	Peristiwa Kunci	Signifikansi Politik
41 H / 661 M	Hasan ibn Ali menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah (<i>'ām al-jamā'ah</i>)	Mengakhiri fragmentasi pasca-Perang Jamal dan mengukuhkan <i>bai'ah</i> tunggal di Kufah, Basrah, dan Damaskus
42 H / 662 M	Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus	Memusatkan kendali militer-administratif di Syam dan memudahkan ekspansi Levant
50-51 H / 670-671 M	Pembentukan jaringan barid (pos) dan kantor cap uang	Cikal bakal birokrasi terpusat dan kontrol informasi negara
60 H / 680 M	Penunjukan Yazid ibn Muawiyah sebagai putra mahkota (suksesi hereditas pertama)	Meresmikan transisi dari <i>khilafah</i> kolektif ke monarki patrimonial
61 H / 680 M	Tragedi Karbala (perlawanan Husain ibn Ali)	Memicu oposisi ideologis terhadap legitimasi Umayyah sejak masa Yazid

Langkah Muawiyah menginstitusikan sistem pemerintahan monarki memicu pergeseran konseptual dari khilafah kepada model kerajaan patrimonial.¹¹ Debat ulama abad II/ VIII seperti al-Mawardi dalam *al-Ahkām al-Sulthāniyyah* menunjukkan upaya

⁹ Beberapa sumber otoritatif seperti *Shahih Tarikh al-Thabari*, *Ashhabu al-Futya*, dan *al-Bidayah wa al-Nihayah* memuat keterangan mengenai tanggal wafat Imam Ali. Secara eksplisit, *al-Bidayah wa al-Nihayah* juga mencatat bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Rabiul Awwal.

¹⁰ Peristiwa ini dalam khazanah sejarah Sunni dikenal sebagai *'ām al-jamā'ah*, yakni peristiwa historis yang menandai penyatuan umat Islam setelah masa fitnah dan konflik internal yang ditandai dengan penyerahan kekuasaan oleh al-Hasan kepada Muawiyah pada tahun 41 H sebagai upaya menjaga stabilitas umat. Lihat: al-Ṭabari, *Tārikh Al-Rusul Wa-l-Mulūk*, 5:132–135; Nur Aulia Rustan, “Konflik Bani Hasyim Dan Bani Umayyah (Konflik Politik Ali Bin Abi Thalib Dan Muawiyah Bin Abi Sufyan)” (Thesis (Undergraduate), IAIN Parepare, 2020), accessed April 14, 2025, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4261/>.

¹¹ Patricia Crone, *Roman, Provincial and Islamic Law: The Origins of the Islamic Patronate*, 1st ed. (Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2002), 40–45.

menemukan justifikasi Fiqih atas sistem *bai'ah*-wilayah yang diwariskan.¹² Dalam kerangka teori negara pra-modern, konsolidasi ini berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi setelah perang internal, namun menanam benih oposisi ideologis (Syiah Zaydi, Khariji) yang kelak menggugat legitimasi dinasti. Dibandingkan Khulafaur Rasyidin, otoritas Umayyah bertumpu pada pengendalian aparat provinsi dan patronase suku, yaitu dominasi kelompok etno-politik seperti yang dikemukakan Crone (2015),¹³ yang memungkinkan ekspansi cepat tetapi menciptakan ketegangan antar-koalisi suku dan sulit dikendalikan secara institusional. Dengan demikian, transisi 41 H bukan hanya peralihan figur, melainkan rekayasa institusional yang mendefinisikan ulang konsep kepemimpinan politik dalam Islam pada masa-masa awal.



Gambar 1. Garis legitimasi Umayyah, 661–705 M

Pada awal kekuasaan Umayyah, peta kekuatan politik Syam didominasi dualitas suku besar, yaitu Qays dan Yaman (Tabel 2). Koalisi Yaman yang terdiri atas suku Kalb, Kindah, dan Ghassān, menjadi tulang punggung militer Damaskus, memperoleh preferensi jabatan di *diwān al-jund* dan konsesi pajak negeri Hijaz.¹⁴ Sebaliknya, kubu Qays yang terdiri dari suku Sulaym, Hawazin, dan Kilab, yang sangat berpengaruh di Jazirah Arab dan Irak, sering memprotes kebijakan fiskal pusat dan menuntut keseimbangan distribusi *ghanimah*. Ketegangan ini akhirnya memuncak dalam Pertempuran *Marj Rāhiṭ* (64 H/684 M) ketika Abdul Malik mendukung Yaman untuk menundukkan pemberontakan Qaysi di bawah al-Dahhak ibn Qays.

Tabel 2. Komposisi faksi Qays – Yaman dalam jabatan gubernur provinsi (661 – 705 M)

Provinsi / Front	Suku Dominan Gubernur (661-684 M)	Suku Dominan Gubernur (685-705 M)	Keterangan
Syam (Damaskus & Hams)	Yaman (Kalb, Kindah)	Yaman	Basis kekuatan istana; akses gaji <i>diwān al-jund</i>
Jazirah & Armenia	Qays (Sulaym, Hawazin)	Qays	Perbatasan Bizantium; rawan perebutan komando
Irak & Khurasan	Qays (Kilab)	Campuran (Qays > Yaman)	Ketidakpuasan fiskal Qaysi sering memicu pemberontakan
Mesir	Yaman	Yaman	Jalur logistik gandum; relatif stabil di bawah Kalbi
Ifriqiyah & Andalusia	Yaman awalnya, lalu campuran	Campuran	Garnisun Barbar (perekrutan lokal mereduksi dominasi suku Arab)

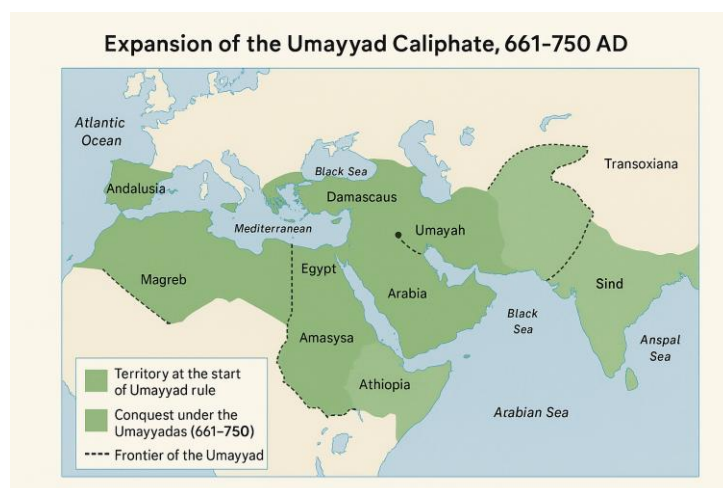
¹² Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sultāniyya* (Cairo: Dār al-Ḥadits, 1996), 20–23.

¹³ Crone, *Roman, Provincial and Islamic Law*, 78.

¹⁴ Hugh Kennedy, *The Great Arab Conquests: How the Spread of Islam Changed the World We Live In* (London: Weidenfeld & Nicolson, 2007), 151–154.

Pola patronase ini memperlihatkan apa yang Kennedy sebut “politik keseimbangan tribal,”¹⁵ di mana khalifah memainkan rivalitas antar-faksi guna mempertahankan loyalitas tetapi menanggung biaya sosial tinggi. Sementara Yaman menjamin stabilitas Damaskus dan jalur haji, keberpihakan berlebihan menciptakan perasaan marginalisasi pada kelompok Qays yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang memperkuat solidaritas trans-regional untuk melawan dinasti.¹⁶ Perspektif antropologis Barthian menegaskan bahwa identitas suku bersifat situasional; ketika insentif fiskal menurun pada akhir pemerintahan al-Walid II, aliansi Qays–Khawārij di Irak mempercepat penurunan legitimasi politik Umayyah.¹⁷ Dengan demikian, dinamika suku bukan hanya seputar latar sosial, melainkan variabel struktural yang memediasi kebijakan fiskal, rekrutmen militer, dan stabilitas politik dinasti secara keseluruhan.

Sejalan dengan konsolidasi internal, Umayyah juga memperluas wilayahnya secara besar-besaran (Gambar 2). Pada masa Muawiyah, kekhalifahan dibagi menjadi lima front komando: Jazirah Arab, Mesir, Irak-Teluk sampai Punjab, Asia Kecil (Armenia-Azerbaijan), dan Afrika-Andalusia. Struktur ini memudahkan koordinasi operasi gabungan, termasuk penaklukan Sindh (711 M), Transoxiana (705-715 M), dan maklumat *Jabal Thariq* di Andalusia yang menembus Selat Gibraltar hingga pesisir Atlantik. Di setiap front, gubernur bertindak ganda sebagai panglima, sedangkan *diwān al-jund* Damaskus mencatat logistik, gaji, dan rotasi pasukan secara terpusat.¹⁸



Gambar 2. Peta ekspansi kekhalifahan Umayyah, 661-750 M

Pendekatan militer-spasial semacam ini mencerminkan apa yang Kennedy sebut sebagai “*ekspansionisme ad hoc*” yang fleksibel namun sangat bergantung pada kapasitas inisiatif gubernur lokal. Sistem ini memang mempercepat mobilitas pasukan ringan Arab-Syam, namun menimbulkan tantangan administratif berupa: (1) kesenjangan pendapatan

¹⁵ Ibid., 76.

¹⁶ Maysaroh, “Analisis Dampak Arabisasi Pada Masa Dinasti Umayyah Di Timur.”

¹⁷ Fredrik Barth, *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference* (Long Grove: Waveland Press, Inc, 1998), 28–30.

¹⁸ Nashrurrahman Zein, “Contribution of the Umayyad Dynasty to the Development of Islamic Civilization (661-750 AD),” *Jurnal El Tarikh : Journal of History, Culture and Islamic Civilization* 3, no. 1 (May 29, 2022): 31–40.

antar-front dimana *kharāj* Irak jauh melebihi Jazirah Arab, (2) kebutuhan komunikasi cepat yang kemudian mendorong perluasan jaringan *barid*, dan (3) rentannya koordinasi saat pusat lemah, misalnya ketika Qays-Yaman berebut komando di perbatasan Armenia. Dalam perspektif teori “imperial overstretch,” keberhasilan ekspansi justru meningkatkan beban fiskal negara karena setiap front menuntut keberadaan pos tetap pasukan dan subsidi bagi kota-kota pemukiman militer. Oleh sebab itu, ekspansi wilayah bukan hanya pencapaian militer, tetapi juga menciptakan tekanan struktural yang tanpa reformasi fiskal menyeluruh justru dapat mempercepat krisis legitimasi pada akhir kekuasaan Umayyah.

3.2. Inovasi Fiskal dan Kebijakan Ekonomi

Setelah fase konsolidasi politik relatif tercapai di pertengahan abad ke-7 M, Dinasti Umayyah segera mengarahkan energinya pada penataan ekonomi yang terstruktur melalui tiga inisiatif utama. Ketiga hal ini adalah: arabisasi sistem mata uang untuk mengganti koin Bizantium-Sasanid; penyusunan ulang sistem perpajakan agar kas negara stabil dan transparan, serta pembentukan skema pembiayaan militer terpusat melalui *dīwān al-jund* agar sistem pencatatan dan pendistribusian gaji pasukan dapat dilakukan secara lebih sistematis.¹⁹ Kebijakan-kebijakan ini diterapkan secara bertahap antara tahun 693 M hingga 705 M. Meskipun mendorong integrasi pasar dari Sindh sampai Andalusia, reformasi ini pada akhirnya menciptakan beban fiskal jangka panjang yang menyebabkan krisis akhir dinasti.²⁰

Pada 73 H atau sekitar tahun 693 M, Khalifah Abdul Malik melakukan manuver penting: memperkenalkan dinar dan dirham versi Arab. Hal ini tidak hanya menandai pergantian fisik mata uang melainkan terdapat muatan simbolik dan ideologis.²¹ Ia juga mencabut ikon-ikon kekaisaran terdahulu, mengganti huruf Yunani dan Pahlavi dengan aksara Kufi, serta mencantumkan kalimat tauhid sebagai penanda kedaulatan. Di sisi teknis, berat koin distandarisasi menjadi 4,25 gram emas dan penggunaannya diwajibkan di pusat-pusat ekonomi seperti Damaskus, Kufah, dan Fustat. Sementara itu, fasilitas pencetakan uang (*dār al-ḍarb*) dibangun di al-Hīra dan Wasit yang didukung oleh penguatan cadangan ketersediaan emas yang sebagian bersumber dari tarif zakat tambang dan pajak lalu-lintas karavan Syam–Hijaz.

Reformasi ini tidak hanya mengokohkan identitas negara, tetapi juga mempermudah penyatuan fiskal antarwilayah. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, standarisasi koin akan menurunkan biaya transaksi dan mempercepat transisi dari ekonomi barter ke sistem uang penuh. Namun, seperti reformasi besar lainnya, hasilnya tidak sepenuhnya berjalan lancar. Proses konversi yang terlampau cepat justru memicu penimbunan emas oleh istana. Untuk menutup celah ini, tarif *kharāj* di daerah-daerah kaya seperti Irak dan Mesir dinaikkan yang kemudian disambut resistensi oleh elite pemilik tanah. Dengan kata lain, keberhasilan arabisasi koin sebagai simbol dan instrumen ekonomi justru membuka ketegangan baru dalam distribusi logam mulia dan beban fiskal.

¹⁹ Ririn Noviyanti, “Dinar Dan Dirham Sebagai Alternatif Mata Uang: Sebuah Tinjauan Literatur,” *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (December 11, 2017): 177–188.

²⁰ Havis Aravik and Ahmad Tohir, “Perekonomian Pada Masa Dinasti Umayyah Di Andalusia; Sejarah Dan Pemikiran,” *Adl Islamic Economic* 1, no. 1 (April 15, 2020): 81–98.

²¹ Surma Hayani and Nurhasanah Bakhtiar, “Arabisasi Pemerintahan Islam pada Masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan,” *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 3, no. 2 (January 17, 2020): 204–212.

Tidak berhenti di situ, Abdul Malik dan gubernurnya yang terkenal keras (al-Ḥajjāj) mengeluarkan dekret pada 78 H/698 M untuk menata ulang sistem pajak tanah secara lebih rasional.²² Kharāj, yakni pajak atas tanah kemudian disesuaikan berdasarkan tingkat irigasi lahan. Jizyah dikongkretkan hanya untuk non-Muslim yang dewasa dan produktif. Di sisi lain, kaum pedagang Muslim dikenakan *‘ushr* (bea 10%) jika berdagang di wilayah perbatasan. Semua pendapatan ini kemudian dicatat di *dīwān al-kharāj* di Damaskus dan sistem administrasi warisan khalifah sebelumnya dari masa Yazīd digantikan oleh sistem administrasi (*mustajrah*) yang lebih presisi.

Efek awal reformasi ini tampak menjanjikan, yakni perbandingan antara *kharāj* dan *jizyah* pada kurun waktu 685–705 M memperlihatkan peningkatan proporsi *jizyah* dalam penerimaan negara. Namun, kondisi ini segera berubah ketika konversi besar-besaran kaum *Mawālī* (non-Arab Muslim) ke Islam mengikis basis *jizyah* secara signifikan. Negara yang sebelumnya bertumpu pada *jizyah* sebagai sumber pendapatan non-Muslim akhirnya harus mengandalkan *kharāj* secara lebih agresif. Di wilayah Khurasan, misalnya, para pemilik tanah Persia menggunakan celah hukum dan definisi tanah *‘usyriyyah’* yang kabur untuk menghindari tarif yang tinggi.²³ Di sinilah terlihat bahwa sistem pajak Umayyah, meski inovatif secara struktur ternyata belum cukup lentur untuk menanggapi dinamika sosial dan geografi ekonomi antar provinsi.

Di ranah militer, tentara Syam telah menerima *‘aṭā’* atau gaji reguler sejak era Muawiyah. Sementara di bawah kepemimpinan Abdul Malik, sistem ini diperluas dengan tunjangan keluarga dan kompensasi penaklukan (sepertiga *ghanimah* menjadi milik negara). Melalui *dīwān al-jund*, data gaji disalurkan ke tiap barak militer dan koin baru dijadikan standar pembayaran. Langkah ini memperkuat profesionalisme pasukan tetapi di saat bersamaan menciptakan ketergantungan fiskal yang berat. Sekitar 35% pendapatan negara pada 710 M digunakan untuk membayar pasukan. Jelas ini merupakan suatu angka yang mengindikasikan gejala *overstretching* imperial. Ketika ekspansi wilayah melambat, pemasukan dari *ghanimah* turut menyusut.²⁴ Akhirnya, pemerintah pusat semakin bergantung pada *kharāj* dari Irak (wilayah yang justru rawan gejolak). Sementara itu, kebijakan subsidi kepada para tentara baru di Transoxiana dan Sindh hanya menambah tekanan pada kas negara. Ketergantungan pada loyalitas kesukuan (terutama jabilah Yaman dan Syam) dalam pendistribusian *‘aṭā’* juga memunculkan ketimpangan dalam sistem reward. Menurut Patricia Crone (2015), stagnasi fiskal dan beban gaji yang tak fleksibel menjadi salah satu pendorong utama delegitimasi pemerintahan Umayyah menjelang keruntuhannya.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dijelaskan bahwa proyek fiskal Dinasti Umayyah menunjukkan keberanian institusional dalam merancang ulang struktur ekonomi negara. Tetapi ini seperti pisau bermata dua dimana keberhasilan awal reformasi yang ada justru menimbulkan komplikasi baru dalam bentuk ketimpangan beban pajak, kegagalan

²² Muh Rustam Saputra and Siradjuddin, “Kebijakan Dan Prinsip Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah: Inspirasi Untuk Transformasi Ekonomi Masa Kini,” *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 5, no. 5 (2024): 517–530.

²³ Azidni Rofiqo and Fitra Rizal, “Kebijakan Ekonomi Pada Masa Kekhalifahan Bani Umayyah (Studi Kasus Keberhasilan Kebijakan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dan Kegagalan Gubernur Nasar Bin Sayyar Pada Masa Khalifah Marwan II 744-750 Masehi),” *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 16, no. 2 (December 18, 2019): 226–236.

²⁴ Imama Zuchroh, “Menapaki Jejak-Jejak Kemajuan Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (March 23, 2023): 1329–1334.

antisipasi terhadap mobilitas sosial keagamaan, dan beban militer yang makin sulit ditopang. Kondisi ini pada gilirannya bukan menjadi penyangga kekuasaan, kebijakan fiskal justru perlahan berubah menjadi salah satu titik rawan yang mempercepat disintegrasi dinasti.

3.3. Reformasi Administrasi dan Birokrasi Kekhalifahan

Kemajuan ekspansi wilayah yang begitu cepat pada masa Dinasti Umayyah tidak mungkin ditopang tanpa penataan ulang struktur administrasi negara. Ketika batas-batas kekuasaan membentang dari Spanyol di barat hingga ke perbatasan India di timur, kebutuhan akan tata kelola yang efisien dan kohesif menjadi mendesak. Dalam konteks inilah, reformasi administratif yang digagas oleh Khalifah Abdul Malik (685–705 M) menjadi titik balik penting. Ia memimpin restrukturisasi *dīwān* atau lembaga administratif yang sebelumnya bersifat longgar dan lokal menjadi sistem terpusat dengan pembagian kerja yang tegas. Di sisi lain, upaya ini juga membuka potret paradoks birokrasi: modern secara struktur, tetapi masih amat bergantung pada loyalitas personal dan patronase politik.

Reformasi dimulai dengan pembentukan empat *dīwān* fungsional di Damaskus, yaitu *al-kharāj* untuk audit pajak tanah dan kepala, *al-jund* untuk logistik dan penggajian militer, *al-rasā'il* untuk urusan surat-menyurat resmi, dan *al-barīd* untuk sistem pos serta intelijen.²⁵ Tiap *dīwān* merekrut staf (*katib*) berdasarkan kriteria standar, yakni kemampuan baca-tulis Arab, dasar aritmetika, dan surat rekomendasi moral dari *qāḍī* wilayah.²⁶ Gaji mereka berkisar antara 10–15 Dinar per bulan, dibayarkan triwulanan dari *bait al-māl* pusat. Untuk pertama kalinya naskah administrasi dicatat di atas papirus bergaris merah, menggantikan dokumen Yunani dan Syam, sementara depot arsip permanen dibangun di kompleks Masjid Agung Damaskus, sebuah simbol bahwa pusat spiritual sekaligus menjadi episentrum kendali administrasi negara.

Efek langsung dari pembagian kerja ini cukup signifikan. Kennedy mencatat bahwa waktu pemrosesan dokumen resmi turun drastis, dari dua minggu menjadi hanya lima hari.²⁷ Namun manfaat terbesar mungkin terletak pada simbolisme bahasa, dimana untuk pertama kalinya Arab diresmikan sebagai satu-satunya bahasa negara dalam urusan administratif. Ini bukan hanya kebijakan linguistik melainkan langkah kultural-politis yang mempertegas identitas negara Islam pasca-Bizantium dan pasca-Sasanid. Dari perspektif Weberian, reformasi ini bisa disebut embrio dari birokrasi rasional-legal dalam dunia Islam. Tapi seperti banyak sistem yang masih muda, ia belum mampu melepaskan diri dari belenggu patronase. Tanpa sistem kenaikan pangkat berbasis kinerja, *katib* tetap tunduk pada struktur klan, terutama suku Kalbī dan Kindah dari Syam yang menjadikan loyalitas politik lebih menentukan daripada kompetensi teknis.²⁸

Ketergantungan pada pusat kekuasaan Syam menciptakan ketegangan antara pusat dan provinsi. Gubernur Irak dan Khurasan misalnya, sering mengeluhkan tumpang tindih instruksi fiskal dan keterlambatan edaran resmi akibat adanya dualisme regulasi. Data

²⁵ Mathieu Tillier, "The Umayyads and the Formation of Islamic Judgeship" (Routledge, 2020), 168, accessed March 15, 2024, <https://shs.hal.science/halshs-03033241>.

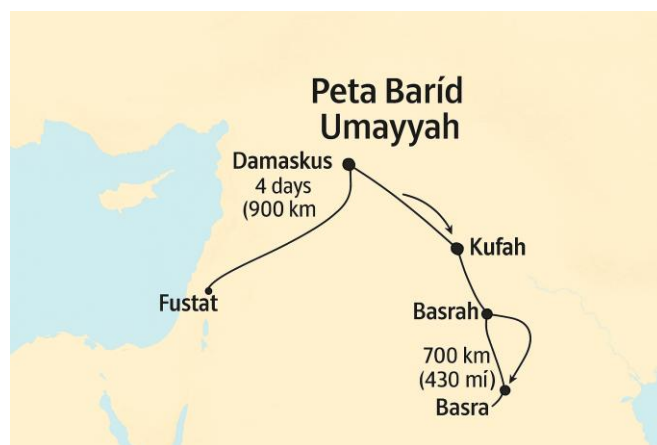
²⁶ Zein, "Contribution of the Umayyad Dynasty to the Development of Islamic Civilization (661-750 AD)."

²⁷ Kennedy, *The Great Arab Conquests: How the Spread of Islam Changed the World We Live In*.

²⁸ Meirison and Saharuddin, "The Distinction of Government Administration and Judicial Institutions in The Umayyad Dynasty."

tahun 700 M menunjukkan bahwa 17% dari anggaran *bait al-māl* dialokasikan hanya untuk operasional administratif (angka yang cukup besar) yang mengindikasikan dua sisi koin, yaitu kapasitas organisasi yang berkembang pesat, tetapi juga beban tetap yang membengkak. Oleh karena itu, meskipun reformasi ini meningkatkan efisiensi negara, tapi di sisi lain justru mempertegas sentralisasi kekuasaan yang pada akhirnya menjadi titik rapuh dukungan dari basis utama Syam.²⁹

Salah satu elemen reformasi paling menarik adalah pelembagaan jaringan pos dan intelijen atau *barīd* (Gambar 3). Sebenarnya, sistem ini telah dirintis sejak era Muawiyah namun kemudian dikembangkan secara masif pada era kepemimpinan Abdul Malik. Setiap 12 mil di sepanjang jalur strategis seperti Damaskus–Kufah–Fustat dibangun stasiun lengkap, yaitu kandang kuda berkapasitas 30–40 ekor, bengkel pelana, penginapan kurir, dan gudang papirus tahan air. Dalam praktiknya, pesan resmi berkode dapat dikirim dari Damaskus ke Kufah dalam empat hari yang menunjukkan sebuah efisiensi luar biasa dibanding karavan dagang biasa yang menempuhnya hampir tiga minggu. Kurir tidak hanya membawa pesan tetapi juga wajib menyusun laporan intelijen ringkas tentang harga pasar, kondisi militer setempat, dan gosip politik. Laporan-laporan ini dimasukkan ke dalam kantong kulit bertanda cap khalifah, menjadikan mereka mata dan telinga pusat kekuasaan.



Gambar 3. Jaringan pos dan intelijen atau *barīd* Dinasti Umayyah

Pembangunan jaringan *barīd* dibiayai dari anggaran *dīwān al-kharāj*, dengan catatan tahun 84 H menunjukkan alokasi sekitar 500.000 Dinar, yakni sekitar 3% dari pendapatan negara. Meski tampak kecil secara proporsi, pengeluaran ini memperlihatkan kesadaran tinggi negara akan pentingnya sirkulasi informasi dan kontrol vertikal yang efisien. Sayangnya, sebagaimana birokrasi lain dalam konteks pra-modern, keunggulan administratif ini tetap dibayangi oleh keterbatasan institusional: belum ada sistem pengawasan independen, dan kebijakan masih sangat dipengaruhi oleh jaringan loyalitas. Dari perspektif yang lebih luas, reformasi administratif Dinasti Umayyah adalah upaya membangun negara dari reruntuhan sistem suku menuju institusi yang lebih rasional dan terstruktur.³⁰ Namun karena reformasi itu dibangun di atas fondasi kekuasaan personal dan

²⁹ Alfin Fahrezy and Rizal Al Hamid, "Pemikiran Politik Niccolo Machiavelli (Studi Kasus Dinasti Umayyah)," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 4, no. 2 (December 31, 2021): 143–164.

³⁰ Dirhamzah Bumar, "Perkembangan Politik dan Ilmu Pengetahuan Masa Dinasti Bani Umayyah," *Al-Hikmah* 22, no. 2 (2020): 80–96.

solidaritas kesukuan, maka efektivitasnya sangat tergantung pada stabilitas dukungan politik Syam. Dengan demikian, ketika dukungan itu mulai goyah maka daya tahan sistem yang dibangun pun ikut melemah.

Efisiensi sistem *barīd* yang telah dibangun memang merekatkan kekhalifahan yang terbentang luas. Dengan kecepatan pengiriman pesan yang melampaui standar zamannya, *barīd* memungkinkan respons militer dan administratif yang relatif gesit. Dalam kerangka neo-institusional, sistem ini berhasil mengurangi ketimpangan informasi (*information asymmetry*) antara pusat kekuasaan di Damaskus dan wilayah-wilayah provinsi. Namun, seiring berkembangnya jaringan ke daerah ekstrem seperti Transoxiana dan Sindh, beban operasional meningkat tajam. Laporan *bait al-māl* tahun 95 H memperlihatkan lonjakan biaya pemeliharaan kuda dan fasilitas, mengingat kondisi iklim ekstrem di rute baru tersebut menuntut pergantian hewan dan personel lebih sering.³¹ Keterbatasan ini menjadi nyata saat pemberontakan Ibn al-Ash'ath meletus antara 701–702 M. Gerilyawan berhasil memutus jalur pos antara Irak dan Syam selama hampir dua minggu. Dampaknya, Damaskus kehilangan koordinasi logistik dan bala bantuan dikirim secara tergesa tanpa persiapan matang.³² Peristiwa ini menyiratkan satu hal yang jelas yaitu *barīd* bukan hanya tulang punggung logistik negara tetapi juga titik rentan yang bila terganggu maka akan mengakibatkan kelumpuhan sementara sistem pemerintahan pusat. Di sinilah letak paradoks sistem komunikasi Umayyah, dimana sistem *barīd* pada satu sisi menjadi kekuatan dan pada sisi yang lain juga menjadi potensi bencana administratif.

Di ranah yudisial, perkembangan administratif mencapai puncaknya ketika Marwan II (744–750 M) memformalkan posisi *Qāḍī al-Quḍāt* atau hakim agung. Jabatan ini bukan hanya simbol hierarki hukum tetapi juga berperan sebagai pengawas pengangkatan *qāḍī* provinsi, pengesah fatwa, dan penyimpan arsip keputusan peradilan.³³ Reformasi ini disertai penyusunan risalah prosedural seperti "*Qawānīn al-Mazālim*" dalam bentuk papirus resmi yang di dalamnya tercantum prinsip-prinsip formal seperti kesaksian harus datang dari dua Muslim yang adil, sumpah tercatat di hadapan *qāḍī*, dan tersedia hak banding ke Damaskus dalam jangka 40 hari. Preseden penting dari reformasi hukum ini muncul dalam sengketa pajak tanah di Khurasan pada tahun 702 M, ketika seorang *qāḍī* pusat menolak kebijakan tarif ganda atas pajak tanah (*kharāj*) yang diberlakukan oleh gubernur al-Ḥajjāj. Keputusan ini kemudian disebarkan sebagai surat edaran ke seluruh provinsi yang merupakan sebuah langkah awal menuju prinsip hukum yang merata.

Dari perspektif sejarah hukum, upaya Umayyah ini dapat dilihat sebagai fondasi bagi kodifikasi fikih yang berkembang di abad II hingga III H. Akan tetapi, pada zamannya, efektivitas reformasi yudisial masih dibatasi minimnya pelatihan dan kaderisasi *qāḍī* di luar wilayah inti Syam. Akibatnya, walau lembaga hukum mulai menunjukkan formalitas kelembagaan, standar substansi hukum tetap tercecer. Pada saat yang sama, di tengah kebutuhan akan keadilan yang merata, keluhan terhadap ketidakadilan administratif dijadikan senjata ideologis oleh Abbasiyah untuk melakukan propaganda yang mengusung janji akan kesetaraan dan pembaruan. Dengan demikian, dinamika reformasi administrasi dan yudisial Dinasti Umayyah memang menunjukkan langkah berani dalam membangun

³¹ Fatmawati Fatmawati and Mami Nofrianti, "The Development of Islamic Law during the Reign of Abdul Malik Ibn Marwan (65-86 AH/685-705 AD)," *Proceeding IAIN Batusangkar* 1, no. 2 (May 18, 2020): 181–186.

³² Hayani and Bakhtiar, "Arabisasi Pemerintahan Islam pada Masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan."

³³ Frastuti, "Reformasi Sistem Administrasi Pemerintahan, Penakhlukkan Di Darat Dan Di Lautan Pada Era Bani Umayyah."

negara hukum dan komunikasi modern. Namun pada saat yang sama, reformasi itu tetap dibayangi kontradiksi antara visi institusional dan kenyataan sosial-politik yang belum seluruhnya mendukung kebijakan tersebut. Seperti banyak kerajaan besar lainnya, kekuatan terbesar mereka justru menyimpan sumber kelemahan yang akhirnya membuka jalan bagi transisi kekuasaan berikutnya.

3.4. Faktor Kemunduran dan Pelajaran Historis

Meskipun Dinasti Umayyah pernah mencapai kemajuan luar biasa dalam bidang politik, ekonomi, dan administrasi, namun masa pertengahan abad ke-8 menjadi saksi atas rapuhnya fondasi kekuasaan mereka. Tiga tekanan besar muncul secara bersamaan dan saling memperparah, yakni berkembangnya oposisi ideologis dan sosial, ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara (sebuah fenomena yang sering disebut sebagai *"imperial overstretch"*), serta krisis legitimasi yang dimanfaatkan secara strategis oleh gerakan Hasyimi, terutama di Khurasan.³⁴ Krisis-krisis ini tidaklah muncul begitu saja melainkan akibat dari kelalaian struktural dan ketidakmampuan negara dalam membaca dan menyesuaikan diri terhadap dinamika sosial yang terus berkembang secara signifikan.

Krisis legitimasi ini tercermin dalam meningkatnya gelombang pemberontakan setelah tahun 738 M (120 H). Serangkaian perlawanan dari kaum Berber Khariji di Maghrib, mawālī Persia di Khurasan, hingga koalisi Syi'ah Zaydī di Irak menunjukkan bahwa stabilitas Umayyah sebenarnya rapuh secara struktural. Bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, frekuensi insiden bersenjata pada kurun 720–747 M meningkat hampir tiga kali lipat.³⁵ Faktor pemicunya pun beragam, yaitu diskriminasi fiskal terhadap *mawālī*, ketimpangan dalam sistem gaji militer antara pasukan Syam dan provinsi, serta narasi keagamaan yang menguatkan kembali aspirasi kepemimpinan *Ahl al-Bayt*. Sosok Abu Muslim menjadi penggerak sentral yang menghubungkan berbagai kekecewaan ini ke dalam gerakan revolusioner yang efektif. Dengan demikian, keruntuhan dinasti Umayyah tidak disebabkan oleh satu kekalahan militer melainkan oleh ketidakmampuan institusional untuk mengakomodasi perubahan sosial-politik yang semakin mendesak.

Di sisi lain, tekanan fiskal menjadi beban struktural yang kian tak tertanggulangi dimana rasio antara pengeluaran militer dan pendapatan negara yang pada awal abad ke-8 relatif stabil (1:2) akhirnya menyempit hingga 3:4 menjelang tahun 740 M. Ekspansi ke wilayah Transoxiana dan Sind yang direncanakan agar dapat menambah pemasukan, justru memperbesar biaya barak dan subsidi militer. Karenanya, negara tetap mempertahankan arabisasi mata uang dengan cadangan emas tinggi serta meningkatkan tarif *kharāj* hingga 15% di wilayah-wilayah subur seperti Irak dan Mesir. Kebijakan ini tidak hanya memicu perpindahan petani ke daerah terpencil tetapi juga menurunkan produktivitas sektor pertanian yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara. Situasi ini menunjukkan kegagalan negara dalam mengembangkan sistem fiskal yang efektif dan efisien.

³⁴ Meirison and Saharuddin, "The Distinction of Government Administration and Judicial Institutions in The Umayyad Dynasty."

³⁵ Aravik and Tohir, "Perekonomian Pada Masa Dinasti Umayyah Di Andalusia; Sejarah Dan Pemikiran."

Kesempatan ini dimanfaatkan secara cerdas oleh gerakan Abbasiyah dengan mengedepankan legitimasi keagamaan sebagai keturunan Nabi dari jalur Hasyimi serta janji pemerintahan yang lebih adil secara sosial dan fiskal.³⁶ Mereka menyusun narasi tandingan yang sangat bertolak belakang dengan kelompok-kelompok yang termarginalkan. Ironisnya, propaganda tersebut disebarakan melalui jaringan *barīd*, yaitu sistem komunikasi negara yang dibangun Umayyah sendiri yang pada titik tertentu justru menjadi alat yang efektif untuk menggulingkan pusat kekuasaan. Ketika Damaskus jatuh pada tahun 750 M (132 H), perpindahan loyalitas elite Irak menandai akhir kekuasaan Umayyah. Hal ini bukan karena kekalahan di medan perang tetapi karena hilangnya daya ikat ideologis dan insentif fiskal yang memadai. Dari seluruh dinamika tersebut, dapat dipetik satu pelajaran mendasar bahwa keberlangsungan kekuasaan negara pra-modern sangat bergantung pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara tiga elemen utama, yaitu legitimasi politik, stabilitas ekonomi, dan fleksibilitas administrasi. Lemahnya salah satu unsur tersebut seperti yang terjadi pada sistem fiskal Umayyah dan eksklusivisme ideologisnya akan membuat keberhasilan ekspansi dan reformasi awal tidak lagi cukup untuk menopang keberlanjutan suatu negara.

4. KESIMPULAN

Kajian ini memperlihatkan bahwa Dinasti Umayyah merupakan prototipe awal dari formasi negara Islam yang menggabungkan dimensi politik, fiskal, dan administratif dalam kerangka institusional yang relatif terorganisasi. Transformasi sistem kekuasaan dari sistem musyawarah menuju monarki menandai pergeseran fundamental dalam konsep legitimasi pemerintahan Islam awal. Di sisi lain, reformasi fiskal dan inovasi administrasi yang digagas oleh para khalifah seperti Muawiyah, Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz berhasil menciptakan infrastruktur negara yang menjangkau wilayah luas. Meski demikian, ekspansi fiskal ini tidak disertai dengan diversifikasi sumber pendapatan negara sehingga ketika terjadi konversi massal kaum *mawālī* (non-Arab yang masuk Islam) maka penerimaan dari *jizyah* mengalami penurunan dan pendapatan negara dari *ghanimah* (harta rampasan perang) juga menyusut. Selain itu, pengeluaran rutin seperti pembayaran tetap untuk *dīwān al-jund* (tentara) dan pembiayaan jaringan *barīd* (pos) yang tetap tinggi akhirnya sehingga menimbulkan defisit struktural. Kondisi ini mencerminkan gejala “imperial overstretch” yang tampak dari rasio pendapatan terhadap belanja negara yang tidak seimbang, yakni 3 banding 4 menjelang tahun 740 M.

Berdasarkan temuan tersebut, kajian ini menegaskan pentingnya menyeimbangkan legitimasi ideologis, kapasitas fiskal, dan birokrasi adaptif dalam model negara modern. Hal ini karena kegagalan Dinasti Umayyah dalam mempertahankan stabilitas disebabkan oleh akumulasi disfungsi struktural, mulai dari ketimpangan fiskal, ketergantungan pada patronase etno-politik, hingga lemahnya mekanisme akuntabilitas dan partisipasi. Temuan ini memperkaya wacana historiografi Islam dengan menunjukkan bahwa keberlangsungan kekuasaan sangat erat kaitannya dengan kemampuan institusi dalam membangun sistem yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan. Meski demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, pendekatan historis-analitis yang digunakan masih bertumpu pada sumber-sumber literatur dan belum mencakup analisis kuantitatif

³⁶ Kiki Widia Sari, Uswatun Hasanah, and Fitria Fitria, “Opposition Movement Against the Umayyad Dynasty’s Rule (661-750),” *Jurnal El Tarikh : Journal of History, Culture and Islamic Civilization* 4, no. 1 (May 20, 2023): 37–44.

atau arkeologis yang dapat memperkuat interpretasi data fiskal dan administratif. Kedua, fokus kajian dibatasi pada periode 661–750 M tanpa menjangkau warisan kelembagaan Umayyah terhadap dinasti-dinasti berikutnya, terutama Abbasiyah awal. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi aspek kesinambungan institusional antara Umayyah dan Abbasiyah termasuk dalam hal transformasi struktur fiskal, model patronase, serta evolusi hukum administratif pasca-reformasi *Qādī al-Quḍāt*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shaibani, Hussein Haleeb. "Umayyad Attempts in Distorting the Image of Imam Hussein (Peace Be upon Him) Critical Review." *Journal Of Babylon Center for Humanities Studies* 12, no. 1 (2022): 503–526.
- Aravik, Havis, and Ahmad Tohir. "Perekonomian Pada Masa Dinasti Umayyah Di Andalusia; Sejarah Dan Pemikiran." *Adl Islamic Economic* 1, no. 1 (April 15, 2020): 81–98.
- Barth, Fredrik. *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. Long Grove: Waveland Press, Inc, 1998.
- Bumar, Dirhamzah. "Perkembangan Politik dan Ilmu Pengetahuan Masa Dinasti Bani Umayyah." *Al-Hikmah* 22, no. 2 (2020): 80–96.
- Crone, Patricia. *Roman, Provincial and Islamic Law: The Origins of the Islamic Patronate*. 1st ed. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2002.
- Fahrezy, Alfin falah, and Rizal Al Hamid. "Pemikiran Politik Niccolo Machiavelli (Studi Kasus Dinasti Umayyah)." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 4, no. 2 (December 31, 2021): 143–164.
- Fatmawati, Fatmawati, and Mami Nofrianti. "The Development of Islamic Law during the Reign of Abdul Malik Ibn Marwan (65-86 AH/685-705 AD)." *Proceeding IAIN Batusangkar* 1, no. 2 (May 18, 2020): 181–186.
- Frastuti, Melia. "Reformasi Sistem Administrasi Pemerintahan, Penakhlukkan Di Darat Dan Di Lautan Pada Era Bani Umayyah." *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 2 (December 18, 2020): 119–127.
- Hayani, Surma, and Nurhasanah Bakhtiar. "Arabisasi Pemerintahan Islam pada Masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 3, no. 2 (January 17, 2020): 204–212.
- Kennedy, Hugh. *The Great Arab Conquests: How the Spread of Islam Changed the World We Live In*. London: Weidenfeld & Nicolson, 2007.
- al-Māwardi, Abū al-Ḥasan. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyya*. Cairo: Dār al-Ḥadits, 1996.
- Maysaroh, Maysaroh. "Analisis Dampak Arabisasi Pada Masa Dinasti Umayyah Di Timur: Perspektif Sosial Dan Politik (661-750 M)." *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, no. 2 (December 31, 2023): 57–61.
- Meirison, Meirison, and Desmadi Saharuddin. "The Distinction of Government Administration and Judicial Institutions in The Umayyad Dynasty." *Buletin Al-Turas* 27, no. 1 (January 30, 2021): 123–138.

- Mohajan, Haradhan Kumar. "Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects." *Journal of Economic Development, Environment and People* 7, no. 1 (2018): 23–48.
- Noviyanti, Ririn. "Dinar Dan Dirham Sebagai Alternatif Mata Uang: Sebuah Tinjauan Literatur." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (December 11, 2017): 177–188.
- Rofiqo, Azidni, and Fitra Rizal. "Kebijakan Ekonomi Pada Masa Kekhalifahan Bani Umayyah (Studi Kasus Keberhasilan Kebijakan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dan Kegagalan Gubernur Nasar Bin Sayyar Pada Masa Khalifah Marwan II 744-750 Masehi)." *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 16, no. 2 (December 18, 2019): 226–236.
- Rustan, Nur Aulia. "Konflik Bani Hasyim Dan Bani Umayyah (Konflik Politik Ali Bin Abi Thalib Dan Muawiyah Bin Abi Sufyan." Thesis (Undergraduate), IAIN Parepare, 2020. Accessed April 14, 2025. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4261/>.
- Saputra, Muh Rustam, and Siradjuddin. "Kebijakan Dan Prinsip Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah: Inspirasi Untuk Transformasi Ekonomi Masa Kini." *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 5, no. 5 (2024): 517–530.
- Saputri, Itsnawati Nurrohmah. "Perkembangan Kubah Batu, Masjid Damaskus, Perluasan Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi pada Masa Khalifah Abdul Malik Bin Marwan dan Walid Bin Abdul Malik." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 2, no. 2 (December 15, 2017): 195–220.
- Sari, Kiki Widia, Uswatun Hasanah, and Fitria Fitria. "Opposition Movement Against the Umayyad Dynasty's Rule (661-750)." *Jurnal El Tarikh : Journal of History, Culture and Islamic Civilization* 4, no. 1 (May 20, 2023): 37–44.
- Setiawan, Agus Mahfudin, and Ahmad Sodikin. "Transisi khalifah Umayyah: dari Muawiyah bin Abu Sufyan ke Yazid bin Muawiyah (661-683 M)." *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 1, no. 1 (2023): 17–31.
- al-Ṭabari, Muḥammad Jarir. *Tārīkh Al-Rusul Wa-l-Mulūk*. Vol. 5. 9 vols. Mesir: Darul Ma'arif, 1967.
- Tillier, Mathieu. "The Umayyads and the Formation of Islamic Judgeship." 168. Routledge, 2020. Accessed March 15, 2024. <https://shs.hal.science/halshs-03033241>.
- Zein, Nashrurrahman. "Contribution of the Umayyad Dynasty to the Development of Islamic Civilization (661-750 AD)." *Jurnal El Tarikh : Journal of History, Culture and Islamic Civilization* 3, no. 1 (May 29, 2022): 31–40.
- Zuchroh, Imama. "Menapaki Jejak-Jejak Kemajuan Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (March 23, 2023): 1329–1334.